

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA TERHADAP PKL BERGERAK DI KOTA SINGARAJA**

Oleh

Ni Putu Martina Putri, NIM 2114101050

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bergerak di Kota Singaraja, dan (2) Faktor pendukung serta penghambat dalam kinerja implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL bergerak di Kota Singaraja serta upaya untuk menanggulangi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Objek penelitian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015, sedangkan subjek penelitian meliputi pejabat Satpol PP Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng, serta PKL bergerak di Kota Singaraja. Penelitian berlokasi di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Satpol PP Kabupaten Buleleng telah melaksanakan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 terhadap PKL bergerak, namun implementasinya belum optimal karena masih tingginya angka pelanggaran dan rendahnya kepatuhan pedagang; (2) Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, koordinasi antarinstansi, serta dukungan fasilitas operasional, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, lemahnya kesadaran hukum PKL, dan faktor ekonomi pedagang; dan (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain meningkatkan sosialisasi, menambah personel penegakan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi bagi PKL bergerak.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pemberdayaan.

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2015
ON THE MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS
TOWARD MOBILE VENDORS IN SINGARAJA CITY**

By

Ni Putu Martina Putri, Student ID 2114101050

Law Studies Program

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the implementation of Buleleng Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 in managing and regulating mobile street vendors (PKL) in Singaraja City, and (2) the supporting and inhibiting factors in the performance of implementing the policy on managing and empowering mobile street vendors in Singaraja City, as well as the efforts to overcome these inhibiting factors. The research method used is an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The study employed purposive sampling techniques. The object of this research is Buleleng Regency Regional Regulation Number 6 of 2015, while the research subjects include officials from the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Buleleng Regency, the Buleleng Regency Trade Office, and mobile street vendors in Singaraja City. This research was conducted in Singaraja City, Buleleng Regency, Bali Province. Data collection techniques consisted of document study, observation, and interviews. The collected data were analyzed qualitatively using an evaluative analysis technique. The results of the study show that: (1) the Satpol PP of Buleleng Regency has enforced Regional Regulation Number 6 of 2015 on mobile street vendors, but the implementation has not been optimal due to the high number of violations and low compliance among vendors; (2) supporting factors for implementation include clear legal basis, inter-agency coordination, and operational facility support, while inhibiting factors include limited personnel, low legal awareness among vendors, and the vendors' economic constraints; and (3) efforts to overcome the inhibiting factors include increasing public outreach, adding enforcement personnel, strengthening cross-agency coordination, and integrating economic empowerment programs for mobile street vendors.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Street Vendors, Management, Empowerment.*